

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembang dan majunya suatu organisasi maka akan semakin kompleks aktivitas yang dijalankan dari kegiatan perusahaan tersebut. Untuk dapat mengkoordinir semua kegiatan di seluruh bagian dan fungsi dalam suatu perusahaan manajemen harus menyusun perencanaan bisnis secara komprehensif sehingga manajer masing-masing fungsi mengerti apa yang harus dikerjakan dan mengusahakan pengendalian yang menyeluruh sehingga kinerja masing-masing manajer menjadi lebih baik, demikian juga kinerja organisasi secara keseluruhan.

Salah satu bentuk atau alat perencanaan dan pengendalian adalah adanya sistem anggaran (*budget*) Riswandari dalam Tresnanty dan Widanaputra (2015). Anggaran tidak hanya penting bagi perusahaan swasta tetapi juga penting dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009).

Dalam proses penyusunan, anggaran memiliki dampak langsung terhadap perilaku manusia. Oleh karena itu, terdapat perilaku-perilaku manusia yang akan timbul sebagai akibat dari anggaran, baik yang bersifat perilaku positif maupun perilaku yang negatif. Perilaku yang positif akan timbul jika tujuan pribadi masing-masing manajer selaras, serasi, dan seimbang dengan tujuan perusahaan (*goal congruence*) dan manajer mempunyai kemauan untuk memenuhinya. Sebaliknya, tindakan negatif yang akan timbul seperti *budgetary slack*. Agar penyusunan Anggaran bisa berhasil, semua manajer harus dapat bekerjasama dan memahami peranannya bagi keberhasilan anggaran tersebut (Matz, 1991).

Salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran akan meningkatkan prestasi, karena jelas apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran anggaran. Begitu juga sasaran yang spesifik akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari pada sasaran yang samar-samar (Dalimunthe dan Siregar, 1994). Kejelasan sasaran anggaran dimaksud adalah berkenaan dengan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dipahami oleh orang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran anggaran.

Masalah yang sering muncul dari adanya keterlibatan manajer tingkat bawah hingga atas dalam penyusunan anggaran adalah penciptaan *budgetary slack*. *Budgetary slack* adalah perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik dari organisasi. *Budgetary slack* biasanya dilakukan dengan meninggikan biaya atau menurunkan pendapatan dari yang

seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai (Merchant dalam Tresnanty dan Widanaputra, 2015).

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebelum menyusun anggaran harus mengetahui terlebih dahulu aktivitas – aktivitas apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Hal ini sudah dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, terbukti dengan terlihatnya Rapat Evaluasi Kinerja Program Kegiatan SKPD Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2013.

Dengan demikian alasan peneliti mengambil penelitian pada Pemerintah Ponorogo adalah untuk mengetahui apakah penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggarannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Menurut Bupati terpilih, Ipong Muhlisoni yang dikutip oleh Setenpo.com, pada periode tahun 2015 terdapat permasalahan pada birokrasi pemerintahan, mulai dari kekosongan kursi hingga kesalahan penempatan jabatan. Bupati terpilih menunjukkan bukti sebanyak 9 kursi kepala dinas kosong. Yakni, kursi kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Bakesbangpol Linmas, Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Pekerjaan Umum, Asisten Pemerintahan, Staf Ahli, dan Sekertaris DPRD.

Mohammad Ridwan dalam Lensa Indonesia.com (08/11/2014) mengemukakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo masih terus berlanjut. Menurut Kepala Kajari Ponorogo, Sucipto akan menindaklanjuti

hingga akhirnya. Penanganan kasus ini terdapat dugaan korupsi di tiga Satuan Kerja (Satker) yaitu Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Bagian Humas dan Protokol Pemkab. Kasus yang terjadi pada Dinas Pertanian adalah korupsi pengadaan bibit, pada Dinas Pendidikan terjadi penyalahgunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang kasusnya masih terus diusut hingga kini. Sedangkan pada Bagian Humas dan Protokol Pemkab terdapat kasus korupsi program kerja sama pariwisata.

Terkait bersih-bersih pada tingkat internal dan kemungkinan ada oknum Jaksa “nakal”, Kepala Kajari berjanji akan menindak dengan tegas. Termasuk jika pihaknya melakukan kesalahan dan pelanggaran juga layak disanksi. Menurutnya, dalam hal ini masyarakat berhak mengawasi kinerja penegak hukum dan melaporkannya kepada pengawas di Kejati. Penindaklanjutan ini tidak akan memandang status jabatan, mulai dari tingkat paling bawah hingga paling atas. Kasus korupsi ini tidak akan terjadi apabila seluruh komponen meliputi dari bagian penganggaran dan penyusunan program melakukan koordinasi, transparansi yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP *BUDGETARY SLACK* (Kesenjangan Anggaran) pada SKPD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian – penelitian sebelumnya terdapat pengaruh partisipasi penganggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap *budgetary slack*. Penelitian ini mencoba untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap *budgetary slack*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan membahas beberapa masalah antara lain :

- a. Bagaimana pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap *Budgetary Slack* (Kesenjangan Anggaran) pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
- b. Bagaimana pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap *Budgetary Slack* (Kesenjangan Anggaran) pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
- c. Bagaimana pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap *Budgetary Slack* (Kesenjangan Anggaran) pada SKPD Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap *Budgetary Slack* (Kesenjangan Anggaran) pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap *Budgetary Slack* (Kesenjangan Anggaran) pada SKPD Kabupaten Ponorogo.

- c. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap *Budgetary Slack* (Kesenjangan Anggaran) pada SKPD Kabupaten Ponorogo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi masukan kepada pemerintah agar terjadinya senjangan anggaran dapat diminimalkan dan dapat menciptakan karyawan yang lebih kritis lagi dalam berfikir dan bertindak.

b. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah buku referensi dan masukan bagi pihak – pihak bersangkutan yang memerlukan informasi mengenai anggaran, khususnya bagi jurusan Akuntansi.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai *budgetary slack* serta perbandingan antara teori dan praktik yang ada, serta dapat mengaplikasikan secara empiris di dunia kerja dengan harapan dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri dan pihak – pihak lain yang ingin mengetahui

secara lebih mendalam mengenai *budgetary slack* dalam bidang Akuntansi Sektor Publik.

d. Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang akuntansi sektor publik mengenai *budgetary slack*.

